

REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PARTAI GERINDRA KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Roni Tamara Saputra, Titin Purwaningsih
Program Studi Megister Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ronitamarasaputra@gmail.com

Abstrak - Disahkannya Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan. Guna memenuhi kuota tersebut maka Partai Gerindra Kota Yogyakarta harus melakukan proses rekrutmen dengan baik, agar perempuan yang menjadi caleg bukan hanya untuk memenuhi kuota tetapi juga dapat meningkatkan perolehan suara dalam Pileg. Ada dua tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui proses rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dalam perekrutan caleg perempuan dalam Pileg 2014 dilakukan secara terbuka. Adapun mekanisme rekrutmen yang dilakukan dengan 3 cara yaitu tahap administrasi, psikotes dan rekrutmen wawancara. Faktor yang menyebabkan seorang aktif di Partai Gerindra Seseorang berperilaku karena pertama behavioral beliefs yaitu perempuan yang aktif di partai politik telah mengetahui apa keuntungan atau kerugian yang didapatkan ketika perempuan aktif di partai politik. Kedua norma subjektif yaitu adanya dukungan dari orang di sekitarnya seperti keluarga ketika seorang perempuan aktif di partai piolitik. Ketiga Control beliefs merupakan kepercayaan perempuan terhadap faktor-faktor yang mampu memberi kemudahan dalam mewujudkan sebuah tujuan ketika aktif di partai politik.

Kata Kunci: Rekrutmen, Partai Gerindra dan Pileg.

Abstract - *The passage of the Law on Political Parties No. 2 Year 2011 concerning Political Parties give a mandate to the political parties to meet the 30% quota for women. In order to meet the quota then Gerindra Yogyakarta have to do the recruitment process well, so that women who become candidates not only to meet but also can increase the quota of votes in Pileg. There are two objectives in this study are 1) To know the process of recruitment of women candidates in the legislative elections in 2014 in the city of Yogyakarta Gerindra. 2) To determine the factors that influence women Gerindra active in the city of Yogyakarta. In this research method used is qualitative analysis method in a descriptive way. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The results showed that the process for the recruitment of women candidates in the 2014 Pileg conducted openly. The mechanism of recruitment done in 3 ways: stage administrative, psychological and recruitment interviews. Factors that cause a person active in Gerindra behave as the first behavioral beliefs that women are active in a political party has to know what the advantages or disadvantages that can be acquired when women active in political parties. Both subjective norm namely the support of those around him like family when a woman active in the party piolitik. Third Control beliefs is the belief of women to factors capable of facilitating the realization of a goal when active in party politics.*

Keywords: Recruitment, Gerindra and Pileg

I. PENDAHULUAN

Kuota 30% ditetapkan pertama kali pada pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya 61 perempuan terpilih menjadi anggota legislatif dari keseluruhan 500 anggota DPR RI (11,09%) dan pada pemilu 2009 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI meningkat menjadi 101 orang atau 17,86% (Susiana, 2014).

Sementara itu pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI kembali mengalami penurunan menjadi 97 orang atau 17% dari total 560 anggota DPR RI (Parlemen Indonesia, 2014:5). Hasil pemilihan anggota DPR RI ini belum sejalan dengan prinsip Undang-Undang Parpol tersebut.

Prinsip kesetaraan gender juga tercermin pada, Pasal 53 (UUP) legislatif yang menyatakan bahwa daftar bakal calon juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pada Pasal (8) butir di Undang-Undang Pemilu, sekurang-kurangnya dalam kepengurusan Parpol memuat kuota 30% keterwakilan perempuan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan juga terjadi di DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari total anggota DPRD Kota Yogyakarta sebanyak 40 orang hanya 10 orang anggota berjenis kelamin perempuan atau hanya 25% dari jumlah keseluruhan. Ke-10 perempuan calon yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta itu berasal dari Gerindra (lima orang), Golkar (dua orang), dan PDIP, PAN, dan PPP masing-masing satu orang (Prabowo, 2014). Dari ke-10 perempuan yang menjadi Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 5 diantaranya berasal dari Partai Gerindra. Adapun caleg perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perempuan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
2014-2019

No	Nama	Partai
1	Andri Kusumawati, SE	Gerindra
2	Christiana Agustiani	Gerindra

3	Dhian Novitasari, S.Pd	Gerindra
4	Novi Allisa Semendawai	Gerindra
5	Ririk Banowati Permanasari	Gerindra
6	Estri Utami, SE	PAN
7	R.Ay.F. Diani Anindhitiati, S.Sos, MM	Golkar
8	Sila Rita, SH, MH	PPP
9	Suryani, SE, M.Si	PPP
10	Dra. Sri Retnowati	Golkar

Sumber: KPU-jogjaKota.go.id Data diolah (2015)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta pada Pileg 2014 didominasi oleh Partai Gerindra, dimana 5 dari 10 caleg perempuan yang terpilih berasal dari Partai Gerindra. Namun demikian keberhasilan perempuan dari Partai Gerindra yang menduduki kursi DPRD di Kota Yogyakarta tidak diikuti oleh 4 Kabupaten lainnya di Provinsi DIY. Di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul misalnya tidak ada satu pun perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Sedangkan di kabupaten Sleman, Partai Gerindra berhasil menempatkan dua kader perempuannya di DPRD Kabupaten Sleman dan satu orang kader perempuan Partai Gerindra yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Perempuan Anggota DPRD Kab
Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul dan Sleman
2014-2019.

No	Nama	Partai	Kabupaten
1	Suhartini	PKB	GUNUNG KIDUL
2	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E	PDI-P	
3	Desiyanti, S.E	PDI	
4	Dra. Endang Sri Sumartini, M.A.P	PDI	
5	Tina Chadarsi	Golka r	
6	Ery Agustin Sudiyanti, S.E., M.M	Golka r	

7	Wiwik Widiastuti	PAN	KULONP ROGO
8	Supriyani Astuti	Demo krat	
1	Dra. Keksi Wuryaningsih	PDI	
2	Akhid Nuryati	PDI	
3	Ika Damayanti Fatma Negara, SIP	Gerin dra	
4	Nur Eni Rahayu, SE	PKB	
5	Titik Wijayanti, SE	PKB	BANTUL
6	Siti Ismiyatun	Demo krat	
1	Suratun, SH	PAN	
2	Arni Tyas Palupi, ST	Golka r	SLEMAN
3	Nur Laili Maharani, A.Md	PKB	
1	Farida Fuatwati	Gerin dra	
2	Dara Ayu Suharto	Gerin dra	SLEMAN
3	Ismi Sutarti, S.H	Nasde m	
4	Remila Mursinta, S.IP	Nasde m	
5	Nila Rifianti, S.Pd	PDI-P	
6	Dwi Yogamashinta, S.Hut	PDI-P	
	Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes	PDI-P	
	Ida Suryanti, ST	PAN	
	Nuril Hanifah	PAN	
	Rahayu Widi Nuryani, S.H	PKB	
	Rahayu Widicahyani, S.H., M.M	PKB	
	Fika Chusnul Chotimah, S.H	PPP	
	Iffah Nugraheni, S.Ag., M.Si	PPP	
	Nuryanta	PPP	

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa Partai Gerindra memiliki jumlah anggota DPRD terpilih terbanyak jika dibandingkan dengan 12 partai lainnya di Kota Yogyakarta. Selain itu jumlah keterpilihan kader perempuan Partai Gerindra yang

terbanyak juga terdapat di Kota Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekrutmen Caleg Perempuan Pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana proses rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta? 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui proses rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Manfaat Penelitian ini adalah: 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dibidang penelitian sosial dan politik. 2). Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan, baik bagi ilmu pengetahuan pemerintahan, sosial politik, khususnya memberikan pengetahuan tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, seperti: penelitian yang dilakukan oleh Soetomo (2007) dengan judul penelitian “Perspektif Teoritis Model Rekrutmen Perempuan di Bidang Politik”. Hasil dari penelitian ini adalah berbagai teori dan model rekrutmen perempuan di bidang politik yang dibahas merupakan suatu upaya mendekatkan perempuan pada konsep sebenarnya tentang rekrutmen perempuan di bidang politik. Penelitian tentang rekrutmen perempuan juga dilakukan oleh Umaimah Wahid (2011) dengan judul penelitian “Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilu DKI Jakarta Tahun 2012”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya bahkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ai Siti Komaria

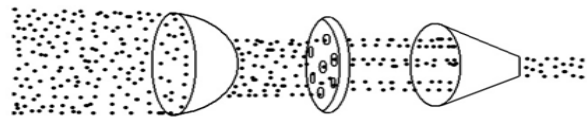
(2012) dengan judul penelitian “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Cianjur: Studi Deskriptif Tentang Pendidikan Politik Bagi Kader Perempuan di Partai Politik”. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama bentuk program kaderisasi partai politik bagi kader perempuan dilakukan oleh partai politik melalui AD ART partai politik yang sudah tersusun secara sistematis dan terprogram secara berjenjang/tingkatan yang dilakukan mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC, sampai dengan tingkat Ranting.

II. Kerangka Teori

Terdapat dua teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Rekrutmen politik dari Model Rush & Althoff (2007) dan theory of planned behavior dari Ajzen (1991). Teori model rekrutmen politik dari Model Rush & Althoff (2007) digunakan untuk menganalisa bagaimana rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Alasan penyusun menggunakan teori model rekrutmen politik dari Model Rush & Althoff (2007) karena teori ini adalah yang paling komplet. Sedangkan theory of planned behavior digunakan untuk menganalisa faktor apa yang mempengaruhi perempuan aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Alasan penyusun menggunakan *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) karena teori ini adalah teori yang paling populer dalam menganalisa perilaku manusia.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: “proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka (Rush dan Althoff, 2007:247)

Michel Rush dan Philip Althoff (2007) model perekrutan politik meliputi 5 proses kegiatan yang dapat diterapkan juga pada perekrutan perempuan di bidang politik, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan.



Penyediaan → Agensi → Kriteria → Kontrol → Tuntutan

Gambar II.1 Model Rekrutmen

Secara lengkap gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan permintaan

Penyediaan rekrutmen politik terhadap caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan partai dalam perekrutan caleg. Penyediaan dan permintaan terdiri dari:

- 1) Mekanisme rekrutmen caleg yang dilakukan partai politik.
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen caleg partai politik.
- 3) Sarana rekrutmen caleg partai politik

Dapat dikatakan pada tahap penyediaan dan permintaan merupakan tahapan awal yang harus dipersiapkan oleh Partai Gerindra untuk melakukan perekrutan caleg perempuan. Dalam tahap ini Partai Gerindra harus mempersiapkan bagaimana mekanisme perekrutan seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu partai harus mempersiapkan tempat dan menggunakan berbagai sarana untuk sosialisasi.

2. Agensi

Agensi rekrutmen politik merupakan penetapan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh caleg yang bersangkutan. Setiap partai tentunya mempunyai kriteria yang berbeda antara partai yang satu dengan partai lainnya. Oleh karenanya partai sebelum melakukan rekrutmen partai sudah mempersiapkan kriteria dan keterampilan seperti apa yang harus dimiliki oleh perempuan agar dapat menjadi caleg yang diinginkan oleh Partai Gerindra.

3. Kriteria

Kriteria caleg oleh partai politik menurut S Katz dan Crotty (2006) antara lain yaitu:

- 1) Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
- 2) Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
- 3) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- 4) Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
- 5) Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.
- 6) Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.

Kriteria utama pada umumnya adalah caleg yang mempunyai popularitas dan finansial yang baik, karena keduanya sangat dibutuhkan untuk mempermudah memenangkan persaingan. Adapun pendidikan, akseptabilitas dan kapabilitas biasanya merupakan faktor yang kurang di utamakan.

4. Kontrol

Kontrol rekrutmen politik caleg, merupakan peran yang dilakukan partai politik dalam mengontrol jalannya rekrutmen caleg. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:

- a) Bakal calon anggota legislatif dari internal partai.

- b) Bakal calon anggota legislatif dari eksternal partai

Dalam pelaksanaan rekrutmen caleg, partai mempunyai dua sumber calon yaitu calon dari internal partai dan dari eksternal partai. Rekrutmen yang baik tentunya rekrutmen yang berasal dari internal partai karena mereka adalah kader yang sudah memahami tujuan berdirinya partai. Namun karena kurangnya kriteria yang dimiliki oleh internal partai maka partai melakukan penjarangan caleg dari luar partai.

5. Tuntutan

Partai politik membuat kontrak politik dengan para caleg agar dapat memenuhi kriteria caleg yang diinginkan oleh masyarakat. Kontrak politik ini dibuat agar para caleg perempuan dapat memenuhi komitmennya untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen. Teori ini mencakup 3 hal yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Adapun lebih jelasnya mengenai Theory of Planned Behavior menurut Ajzen di atas adalah sebagai berikut:

1. Behavioral Beliefs (Sikap)

Sikap adalah suatu keyakinan perilaku positif atau negatif individu untuk menunjukkan perilaku yang spesifik. Dalam teori perilaku terencana, sikap merupakan produk dari *outcome evaluation* dan *behavioral beliefs*. *Outcome evaluation* adalah evaluasi/penilaian individu terhadap kriteria keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari suatu perilaku. Sedangkan *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu terhadap hasil atau konsekuensi yang didapatkan ketika ia mewujudkan perilaku tersebut didasarkan pada kriteria yang telah dinilai/dievaluasi nya dalam *outcome evaluation* (Ajzen, 1991:179).

2. Normative Beliefs (Norma Subjektif)

Norma subjektif adalah dorongan sosial yang menentukan seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam teori perilaku terencana, Ajzen and Fishbein (2005:27-31) menyebutkan norma subjektif merupakan fungsi dari *motivation to comply*

dan *normatif beliefs*. *Motivation to comply* adalah pandangan individu terhadap faktor-faktor lingkungan yang mampu memberi referensi untuk mewujudkan sebuah perilaku. Dalam mekanismenya, *normative beliefs* adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap subjek dalam konteks perilaku yang dihadapinya. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain). Kemudian *motivation to comply* adalah sejauh mana kekuatan referensi tersebut mampu mempengaruhi subjek untuk mewujudkan perilakunya.

3. Control Beliefs

Perceived behavioral control ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Dalam konstruk teori perilaku terencana, kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan hasil fungsi dari control beliefs dan power of control beliefs. Control beliefs adalah kepercayaan individu terhadap faktor-faktor yang mampu memberi hambatan atau mempermudah dirinya dalam mewujudkan sebuah perilaku. Sedangkan power of control beliefs adalah derajat seberapa besar faktor-faktor kontrol tersebut mempengaruhi keputusan seseorang untuk mewujudkan perilaku atau tidak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011:54) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel tetapi menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi dengan apa adanya dengan cara mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dipilih menjadi narasumber penelitian suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, oleh karenanya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Moleong (2007:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sedangkan menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012:317).

Dapat disimpulkan bawa wawancara adalah dialog antara peneliti dengan informan secara tatap muka atau melalui media (misal telepon) guna memperoleh data penelitian. Melalui kegiatan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Wawancara yang akan penyusun tanyakan kepada informan mengenai adalah bagaimana proses perekrutan caleg perempuan, apa alasan Partai Gerindra mencalonkan caleg perempuan yang terpilih, apa yang dilakukan Partai Gerindra sehingga caleg perempuan dapat terpilih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201). Adapun

menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Moleong (2002:161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik. Menurut Sugiyono (2011:329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Pada penelitian ini dokumentasi yang penyusun perlukan adalah AD/ART Partai Gerindra, Struktur kepengurusan Partai Gerindra dan Tugas dan fungsi pengurus partai.

3. Observasi

Menurut Sukmadinata (2006: 220) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Bungin (2007:115) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

C. Analisis Data

Menurut Hamidi (2005:75) unit analisis adalah satuan yang akan diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti akan mencoba menemukan informan awal yakni orang yang pertama memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah ketua DPC Gerindra Kota Yogyakarta, Staf Partai Gerindra dan anggota DPRD fraksi Gerindra.

IV. Deskripsi Wilayah Penelitian

Mengacu pada AD/ART Partai Gerindra, maka Partai Gerindra memiliki beberapa Dewan Pimpinan Cabang yang berada pada tiap-tiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Salah satunya adalah DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Partai Gerindra DPC Kota Yogyakarta beralamat di Jl. Printis

Kemerdekaan No. 19A, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta saat ini dijabat oleh Bapak Anton Prabu Semendawai, SH dengan sekretarisnya yang dijabat oleh Bapak Hariyanto, SH.

Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat cabang serta kepengurusan di bawahnya. Selain itu Dewan Pimpinan Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat cabang. Pengesahan berdirinya DPC ditetapkan oleh DPP atas usulan DPD.

DPC mempunyai berbagai kewajiban, yaitu melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, dan Peraturan Partai lainnya. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/ Kota. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan strategi, Kebijakan, dan Rencana Aksi serta ketentuan partai. Menyampaikan laporan berkala kepada ke pada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang. Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

Demi kelancaran kegiatan partai di tingkat cabang maka DPC Partai Gerindra mempunyai hak untuk membuat berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah cabang. Selain hal tersebut pula DPC juga berhak untuk memberhentikan fungsionaris DPC melalui rapat pleno DPC dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang. Menerima atau

menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai. Bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan kerja sama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang. Jumlah Pengurus Harian DPC sebanyak-banyaknya 17 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekrutmen Caleg

1) Penyediaan dan Permintaan

Dari hasil penelitian mengenai penyediaan dan permintaan, penyusun menyimpulkan bahwa Partai Gerindra telah melakukan tahapan rekrutmen dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhi 3 unsur dalam penyediaan dan permintaan yaitu mekanisme rekrutmen yang dilakukan dengan 3 cara yaitu tahap administrasi, psikotes dan rekrutmen wawancara.

Unsur yang kedua dalam penyediaan dan permintaan adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Partai Gerindra Kota Yogyakarta sudah memulai melakukan proses rekrutmen caleg perempuan 1 tahun sebelum Pileg dilaksanakan. Lamanya waktu ini menunjukkan Partai Gerindra Kota Yogyakarta benar-benar menginginkan kader perempuan yang berkualitas. Unsur ke tiga dalam penyediaan dan permintaan adalah sarana rekrutmen. Dalam melakukan sosialisasi perekrutan caleg perempuan Parta Gerindra menggunakan banyak media seperti koran, baliho, pamflet, media sosil dan lain sebagainya. Namun dalam hal sarana rekrutmen sebenarnya Partai Gerindra Kota Yogyakarta lebih banyak menggunakan *word of mouth*.

2) Agensi

Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa anggota Bapilu tidak hanya berasal dari internal partai, namun juga melibatkan tokoh-tokoh eksternal Partai Gerindra. Pelibatan tokoh diluar anggota Partai Gerindra ini menurut penulis akan menghadirkan netralitas yang tinggi. Netralitas ini sangat diperlukan dalam proses rekrutmen Caleg perempuan, mengingat bakal Caleg perempuan juga dapat berasal dari internal Partai Gerindra. Sehingga jika semua anggota Bapilu berasal dari pengurus Partai Gerindra maka penilaian dalam proses rekrutmen menjadi tidak objektif.

3) Kriteria

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh Partai Gerindra apakah seorang perempuan tertentu layak menjadi caleg perempuan dari Partai Gerindra atau tidak. Kriteria *pertama* adalah usia, sesuai dengan peraturan KPU usia Caleg harus di atas 21 tahun, sehingga Partai Gerindra dalam melakukan rekrutmen Caleg perempuan juga memperhatikan peraturan dari KPU tersebut. Rata-rata usia yang di usung oleh Partai Gerindra 30-40 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa Partai Gerindra juga menginginkan Caleg perempuan yang sudah memiliki pengalaman dalam politik. Namun demikian Partai Gerindra juga memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk ikut serta dalam politik, hal ini dibuktikan dengan adanya Caleg perempuan yang berusia di bawah 26 tahun.

Tabel III.1 Usia Caleg Perempuan

No	Nama	TTL	Usia
1	Andri Kusumawati, SE	08/12/1976	37
2	Christiana Agustiani	26/8/1980	33
3	Dhian Novitasari, S.Pd	11/06/1985	28
4	Novi Allisa Semendawai	14/6/1974	39
5	Ririk Banowati Permanasari	14/11/1966	47
6	Theresia Mursiwi Haryaningtyas, SH	28/9/1967	46

7	RR.CH Nawaning Dyah Siwi	23/3/1963	50
8	Kuntari Jatningsih	18/1/1966	47
9	Sarmaida Tampubolon, SH	14/12/1973	40
10	MB. Dian Ariany Rosita	09/06/1965	48
11	Arum Sriyati, SH	12/04/1971	42
12	Chrisna Putri Febriani, A.Md	17/2/1989	24
13	Bandriyati	10/09/1967	46
14	Ester Sudaryanti Oktarini, SE, AAA.IJ	10/10/1968	45
15	Dwiningsih, S.S	12/07/1983	30

Sumber: KPUD Yogyakarta diolah kembali (2014)

Kriteria kedua adalah popularitas. Walaupun popularitas tidak menjadi jaminan untuk dapat terpilih dalam Pileg namun setidaknya dengan tingkat popularitas yang dimiliki oleh Caleg dapat membantu pada saat berkampanye. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki kapabilitas namun tidak dikenal oleh masyarakat maka belum tentu akan terpilih.

Kriteria *ke tiga* adalah pendidikan. Tingkat pendidikan bakal calon legislatif juga merupakan salah satu pertimbangan dalam direkrut atau tidaknya perempuan untuk menjadi caleg. Tingkat pendidikan dapat mencerminkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Namun nyatanya Partai Gerindra tidak hanya menerima Caleg perempuan yang memiliki gelar sarjana, namun ada juga Caleg perempuan yang hanya lulusan SMA. Hal ini menunjukkan jika Partai Gerindra memandang bahwa pendidikan bukanlah yang terpenting akan tetapi pengalaman yang menentukan. Seberapa tingginya pendidikan seseorang namun tidak memiliki pengalaman dalam politik, akan mudah tersingkir ataupun kalah dalam persaingan.

Kriteria *keempat* adalah kemampuan keuangan dan finansial. Dari data menunjukkan bahwa kemampuan finansial menjadi pertimbangan dalam menentukan caleg tetapi bukan merupakan faktor utama bagi perempuan yang ingin menjadi bakal calon caleg Partai

Gerindra Kota Yogyakarta. Idealnya untuk menjadi caleg dalam Pileg sedikitnya para calon memiliki dana antara 200-300 juta. Sementara itu para caleg perempuan dari Partai Gerindra Kota Yogyakarta banyak yang hanya memiliki kemampuan finansial sebesar Rp 100 juta tetap di terima menjadi caleg Partai Gerindra Kota Yogyakarta pada Pileg tahun 2014.

Kriteria *ke lima* adalah akseptabilitas. Akseptabilitas merupakan faktor terpenting Partai Gerindra dalam merekrut caleg perempuan. Hal ini dikarenakan walaupun memiliki finansial yang baik jika caleg yang bersangkutan tidak diterima oleh masyarakat maka akan kecil kemungkinan dapat terpilih. Oleh karena itu Partai Gerindra merekrut caleg perempuan yang memiliki akseptabilitas baik dengan cara melihat tingkat keaktifan caleg di masyarakat.

Kriteria *ke enam* adalah kapabilitas. Kapabilitas (*capability*) adalah sebuah kemampuan tertentu atau kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dapat dikatakan bahwa semua perempuan yang menjadi caleg Partai Gerindra di Kota Yogyakarta merupakan caleg yang memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari pengalaman yang dimiliki dan dari tingkat pendidikan yang telah di tempuh. Dari sini dapat dilihat bahwa perempuan-perempuan yang menjadi Caleg Partai Gerindra di Kota Yogyakarta merupakan perempuan yang layak dicalonkan.

4) Kontrol

Bentuk kontrol juga dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas yang berisi tentang kesanggupan para bakal caleg perempuan untuk mengikuti seluruh aturan dan atau kegiatan baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang akan diadakan oleh DPC Gerindra Kota Yogyakarta. Fakta integritas juga mencantumkan bahwa apabila terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat II Kota Yogyakarta, maka bakal caleg bersangkutan akan mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Dengan tegas juga menyatakan bahwa apabila bakal caleg melanggarnya, maka

bakal Caleg akan menerima sanksi dalam bentuk apapun.

5) Tuntutan

Berikut bukti bahwa ada tuntutan tertentu terhadap para caleg dari Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Bukti ini dapat dilihat pada adanya keharusan bagi para Caleg untuk menandatangani fakta integritas yang berisi tentang pernyataan bahwa Caleg akan mengikuti seluruh aturan dan atau kegiatan baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang akan diadakan oleh DPC Gerindra Kota Yogyakarta. Dan apabila saya terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat II Kota Yogyakarta, saya akan mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Apabila saya melanggarnya, saya siap menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Agar caleg perempuan memiliki kualitas maka Partai Gerindra membuat berbagai macam tuntutan. Tuntutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari para caleg perempuan itu sendiri. Tuntutan untuk patuh dan taat pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Manifesto Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan Partai Gerindra merupakan salah satu bukti nyata bahwa Partai Gerindra menginginkan para caleg nantinya adalah manusia-manusia yang memiliki visi dan misi dari Partai Gerindra.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta

a) Behavioral Beliefs (Sikap)

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perempuan yang aktif di partai politik memiliki tujuan yang sama. Ada yang hanya ingin menambah pengalaman berorganisasi dan ada juga yang menjadikannya sebagai alat untuk membawa aspirasi. Namun ada pula responden yang belum tahu apa keuntungan yang akan diperoleh pada saat aktif di partai politik, karena pada saat bergabung dengan partai politik responden mengaku hanya diajak oleh Partai Gerindra untuk bergabung guna memenuhi kuota 30%.

b) Norma subjektif

Dapat disimpulkan bahwa faktor dukungan keluarga sangat menentukan aktif tidaknya perempuan untuk aktif di partai politik. Hal ini dikarenakan setiap perempuan yang akan berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif diharuskan melampirkan persetujuan suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan aktif tidaknya perempuan dalam partai politik.

c) Control beliefs

Faktor selanjutnya adalah *Control beliefs* yang merupakan kepercayaan individu terhadap faktor-faktor yang mampu memberi kemudahan dalam mewujudkan sebuah tujuan ketika aktif di partai politik. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah dapat mengikuti Pileg dari partai yang di ikutinya. Setelah caleg perempuan memperoleh kesempatan untuk bertarung dalam Pileg maka mereka memiliki kesempatan untuk dapat dipilih oleh masyarakat. Agar dapat terpilih maka caleg perempuan tersebut mengeluarkan semua kemampuannya untuk menarik simpati masyarakat untuk kemudian memilihnya.

VI. Kesimpulan

a. Kesimpulan

Proses rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta dilakukan secara terbuka. Pada rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 Partai Gerindra Kota Yogyakarta dilakukan secara terbuka. Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka ini dilakukan agar dapat memenuhi kuota caleg perempuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dilihat dari model perekrutan politik yang meliputi 5 proses kegiatan yang dapat diterapkan juga pada perekrutan perempuan di bidang politik, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan telah dipenuhi oleh Partai Gerindra Kota Yogyakarta dalam melakukan rekrutmen caleg perempuan

Faktor yang menyebabkan seorang aktif di Partai Gerindra pertama *behavioral beliefs*

yaitu perempuan yang aktif di partai politik telah mengetahui apa keuntungan atau kerugian yang didapatkan ketika perempuan aktif di partai politik. Kedua, *norma subjektif* yaitu adanya dukungan dari orang di sekitarnya seperti keluarga ketika seorang perempuan aktif di partai politik. Ketiga *Control beliefs* merupakan kepercayaan perempuan terhadap faktor-faktor yang mampu memberi kemudahan dalam mewujudkan sebuah tujuan ketika aktif di partai politik.

b. Saran

Dari kesimpulan di atas maka saran yang penyusun sampaikan yaitu bagi Partai Gerindra Kota Yogyakarta diharapkan dapat mempertahankan pola rekrutmen caleg perempuan yang berasal dari kader partai. Hal ini dikarenakan jika seorang caleg dari internal partai maka akan lebih memahami visi dan misi partai

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ai Siti Komaria. 2012. "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Cianjur: Studi Deskriptif Tentang Pendidikan Politik Bagi Kader Perempuan di Partai Politik". *Tesis*. Universitas Pendidikan Indonesia
- [2] Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, 1991. hlm. 179-211.
- [3] Ajzen, Icek dan Martin Fishbein, "Theory-Based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbis and Sutton", *Journal of Health Psychology*, Vol. 10, No. 1, 2005, hlm. 27-31.
- [4] Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta
- [5] Bungin, Burhan 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- [6] Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press
- [7] Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [8] Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- [9] ParlemenIndonesia. 2014. "Anatomi Caleg DPR RI Terpilih Pada Pemilu 2014". Diakses secara online di parlemenIndonesia.org
- [10] Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [11] Soetomo. 2007. "Perspektif Teoritis Model Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik". *Jurnal Mimbar* Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007
- [12] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- [15] Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [16] _____. 2006. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- [17] Susiana, Sali. 2014. "Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014" *Info Singkat* Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014

[18] Umaimah Wahid. 2011. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

[19] Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[20] Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Partai Politik

Internet

[1] <http://www.republika.co.id>. "Ingin Jadi Anggota DPRD Kabupaten? Siapkan Uang Rp 300 Juta". Diakses dari

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy_nasional/13/04/23/mlon2c-ingin-jadi-anggota-dprd-kabupaten-siapkan-uang-rp-300-juta. Tanggal 6 April 2016

[2] <http://www.republika.co.id>. "Izin Suami Diduga Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuota Perempuan" Diakses dari

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/01/mkkzr4_izin-suami-diduga-penyebab-tidak-terpenuhinya-kuota-perempuan. tanggal 6 April 2016

[3] <http://jogja.tribunnews.com>. "Novi Lepas Profesi Sebagai Pengacara". Diakses dari

<http://jogja.tribunnews.com/2014/05/22/novi-lepas-profesi-sebagai-pengacara>. Tanggal 6 April 2016

[4] KPU-jogjaKota.go.id

[5] Prabowo, Danang. 2014. "10 Kursi DPRD Kota Yogyakarta Milik Perempuan". Diakses dari

<http://pemilu.sindonews.com/read/862979/113/10-kursi-dprd-kota-yogyakarta-milik-perempuan-1399927831>